

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dari sumber sampah dengan pemrosesan akhir. Hal ini perlu dilakukan mengingat sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga dengan pengelolaan yang dilakukan secara berkesinambungan dari hulu ke hilir dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 menyatakan bahwa timbulan sampah yang terkelola selama 5 tahun harus mencapai 80%. Peraturan Presiden ini juga menargetkan bahwa persentase penurunan sampah harus mencapai 20% dalam waktu 5 tahun. Program kebersihan kota dan penanggulangan sampah pada umumnya sudah dilaksanakan oleh hampir semua pemerintah daerah kota/kabupaten di seluruh nusantara, termasuk Kota Pariaman. Kota Pariaman, sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, perkembangan ini tentu saja diikuti pula dengan permasalahan khas perkotaan, yang salah satunya adalah masalah persampahan.

Sesuai dengan Visi RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013-2018 sebagai Kota Tujuan Wisata Dan Ekonomi Kreatif Berbasis Lingkungan, Budaya dan Agama, pemerintah Kota Pariaman dalam pelaksanaan pembangunan harus selalu memperhatikan kelestarian lingkungan. Visi ini dijabarkan lagi dalam misi 4 yaitu Optimalisasi Hasil Pembangunan dan Sarana Prasarana Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan, salah satunya melalui kebijakan Peningkatan Pelayanan Persampahan Skala Kota dan di Tingkat Masyarakat. Kebijakan ini memberikan *outcome* Terkelolanya Sampah Kota Pariaman Sebesar 70% pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2018.

Peningkatan timbulan sampah terjadi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah secara alami. Berdasarkan hasil penelitian Novriyanti (2007), timbulan sampah domestik Kota Pariaman tahun 2007 sebesar 1,76 l/o/h atau 135,07 m³/hari. Dan dari hasil penelitian pendahuluan, timbulan

sampah Kota Pariaman tahun 2017 adalah sebesar 2,66 l/o/h atau 231,31 m³/hari. Dari data ini terlihat bahwa terjadi peningkatan timbulan sampah sebesar 51,13% selama 10 tahun. Dengan peningkatan penduduk sebesar 13,07% selama 10 tahun, perbandingan pertumbuhan timbulan sampah dengan pertumbuhan penduduk adalah lebih kurang sebesar 4 : 1.

Sampai saat ini pola pengelolaan sampah di Kota Pariaman masih menggunakan pola konvensional kumpul-angkut-buang. Dari 231,31 m³/hari potensi sampah Kota Pariaman, volume sampah yang terkumpul dan terangkut ke TPA pada tahun 2015-2017 baru mencapai mencapai 78 m³/hari, dengan cakupan layanan baru menjangkau 24 desa/kelurahan. Tentunya masih ada timbulan sampah yang tidak terkelola sebesar 153,31 m³/hari atau sekitar 66,28% yang tersebar di 47 desa/kelurahan yang belum terlayani.

Tingginya potensi timbulan sampah yang tidak terlayani oleh pemerintah Kota Pariaman, bisa berdampak buruk untuk pembangunan kota jangka panjang. Keberlanjutan pembangunan (*sustainability development*) akan terganggu karena sampah yang tidak terkelola akan dapat menimbulkan masalah pencemaran lingkungan, baik pencemaran air, tanah dan udara serta meningkatkan potensi bencana lingkungan. Untuk itu pemerintah Kota Pariaman harus melakukan upaya yang serius dalam mengelola sampah tersebut agar volume sampah dapat dikendalikan dengan baik dan pelayanan sampah dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat.

Informasi dari Kasi Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman, menyatakan bahwa rendahnya cakupan pelayanan sampah tersebut disebabkan karena terbatasnya anggaran. Berdasarkan telaahan terhadap APBD Kota Pariaman, anggaran pengelolaan persampahan Kota Pariaman hanya bersumber dari APBD termasuk didalamnya retribusi sampah. Anggaran untuk operasional kebersihan dari tahun ke tahun mengalami penurunan, dimana pada tahun 2013 sebesar Rp. 5.168.256.000 atau sekitar 0,87% dari total belanja APBD, menjadi sebesar Rp.5.477.287.500 pada tahun 2014. Tahun 2015 anggaran operasional kebersihan hanya sebesar Rp.4.936.710.000 atau sekitar 0,69% dari total belanja APBD. Sementara untuk tahun 2016 biaya operasional kebersihan yang dianggarkan sebesar Rp.4.564.067.800 dan tahun 2017 menurun menjadi sebesar

Rp.3.931.692.000. Penurunan anggaran ini memang disebabkan karena keterbatasan anggaran yang ada. Dengan besaran anggaran tersebut, daerah yang terlayani petugas kebersihan belum mencapai target yang diharapkan, dimana pada tahun 2013-2014 hanya sebesar 32% dan tahun 2015-2017 sebesar 33,8% dari total desa/kelurahan di Kota Pariaman.

Sementara itu target penerimaan dari retribusi sampah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 berturut-turut adalah sebesar Rp.60.000.000, Rp.75.000.000, Rp.102.000.000, dan meningkat menjadi Rp.112.200.000 pada tahun 2017. Jumlah ini baru mencapai rata-rata sebesar 2% dari total biaya pengelolaan sampah. Hal ini belum sesuai dengan arahan Ditjen Cipta Karya (2015) mengenai prinsip *cost recovery*, yang menyatakan bahwa biaya pengelolaan persampahan diusahakan diperoleh dari masyarakat (80%) dan pemerintah daerah (20%) yang digunakan untuk pelayanan umum antara lain: penyapuan jalan, pembersihan saluran dan tempat-tempat umum. Sedangkan dana pengelolaan persampahan suatu kota besarnya disyaratkan antara 5%-10% dari total belanja APBD.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, tarif retribusi sampah perumahan ditetapkan sebesar Rp.5.000/KK/bulan baik untuk rumah mewah, sedang ataupun kecil. Dengan nilai retribusi sampah rumah tangga di Kota Pariaman saat ini sebesar Rp5.000/KK/bulan, jumlah rumah tangga yang terlayani petugas kebersihan hanya sekitar 5.852 KK atau $\pm 31,46\%$ dari keseluruhan rumah tangga yang ada di Kota Pariaman. Dengan demikian masih ada $\pm 68,54\%$ rumah tangga lain yang belum terlayani petugas kebersihan.

Uraian permasalahan pengelolaan sampah Kota Pariaman diatas memberikan gambaran bahwa, terbatasnya anggaran pengelolaan sampah yang hanya bersumber dari APBD dan rendahnya penerimaan retribusi pelayanan kebersihan menyebabkan rendahnya tingkat pelayanan kebersihan di Kota Pariaman. Untuk itu penulis merasa tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis tentang strategi pengelolaan sampah Kota Pariaman, khususnya dari segi pembiayaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa minimnya anggaran untuk biaya operasional kebersihan menyebabkan rendahnya tingkat pelayanan kebersihan di Kota Pariaman. Dengan anggaran operasional pengelolaan sampah yang hanya berasal dari APBD sebesar Rp. 3.931.692.000, timbulan sampah yang terkelola hanya sebesar 78 m³/hari. Perkiraan anggaran operasional agar seluruh timbulan sampah sebesar 231,31 m³/hari dapat terkelola adalah sebesar Rp.8.492.964.500. Dengan demikian masih dibutuhkan anggaran sebesar kurang lebih Rp.4,6 milyar lagi agar pengelolaan sampah tercover 100%. Sejauh ini belum ada peran swasta dalam pengelolaan sampah Kota Pariaman dan Pemko Pariaman sendiri belum melakukan terobosan terkait dengan alternatif sumber pembiayaan pengelolaan sampah, agar seluruh masyarakat dapat terlayani oleh petugas sampah.

Dalam pengelolaan persampahan, idealnya seluruh masyarakat terlayani oleh pengelola kebersihan. Dengan kondisi pelayanan persampahan di Kota Pariaman saat ini yang belum optimal, diperlukan solusi untuk mengatasi rendahnya tingkat pelayanan persampahan. Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pembiayaan dalam pengelolaan sampah di Kota Pariaman. Oleh sebab itu yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah “bagaimanakah strategi pembiayaan pengelolaan sampah di Kota Pariaman?”

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan penelitian dari rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimanakah kebutuhan biaya pengelolaan sampah di Kota Pariaman?
2. Bagaimanakah sumber pembiayaan pengelolaan sampah di Kota Pariaman?
3. Apa strategi yang paling efektif dan efisien dalam pembiayaan pengelolaan sampah di Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan kebutuhan biaya pengelolaan sampah Kota Pariaman;
2. Mendeskripsikan sumber pembiayaan pengelolaan sampah Kota Pariaman, baik yang bersumber dari masyarakat maupun dari pemerintah;

3. Menemukan strategi yang paling efektif dan efisien dalam pembiayaan pengelolaan persampahan di Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan oleh Pemko Pariaman terkait dengan kebutuhan biaya dan sumber pembiayaan pengelolaan persampahan;
2. Sebagai masukan dan kontribusi positif bagi pembuat kebijakan dalam penyusunan perencanaan strategis program dan kegiatan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan;
3. Sebagai panduan dan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai strategi pembiayaan pengelolaan sampah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

1. Mengkaji kebutuhan biaya pengelolaan sampah Kota Pariaman;
2. Mengkaji sumber pembiayaan pengelolaan sampah Kota Pariaman, khususnya yang bersumber dari masyarakat dan pemerintah;
3. Menemukan strategi pembiayaan pengelolaan sampah Kota Pariaman yang paling efektif dan efisien.

